

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintah daerah wajib menyusun perencanaan daerah yang meliputi RPJPD 20 tahun, RPJMD 5 tahun, dan RKPD tahunan. Kemudian dinas/badan daerah wajib menjabarkannya ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RPJPD provinsi memuat visi, misi dan arah pembangunan dengan mengacu RPJP nasional. Begitu pula dengan RPJPD kabupaten/kota yang mengacu RPJP nasional dan RPJPD provinsi. Sehingga adanya keselarasan pembangunan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Dalam penyusunan rancangan awal RPJPD, Bappeda sebagai koordinator dalam menyusun RPJPD, meminta masukan dari Perangkat Daerah beserta para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan.

Dokumen Perencanaan yang tertuang dalam RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD. Bappeda mengkoordinasikan rancangan RKPD menggunakan rancangan Renja yang disusun setiap Perangkat Daerah. Rancangan RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kinerja dan pendanaan serta perkiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu

indikatif, baik yang bersumber dari dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang diperoleh dengan melalui partisipasi masyarakat ataupun pihak swasta.

Pembangunan merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari tahapan yang bersifat jangka panjang, menengah, dan tahunan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

Penyusunan RKPD sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 3 ayat (2), dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga memiliki kewajiban dalam menyusun RKPD dimaksud.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu provinsi yang masa jabatan Kepala Daerah atau Gubernur berakhir pada tahun 2023. Oleh sebab itu maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 serta Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Daerah 2023-2026. Hal ini disebabkan dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan pelaksanaan Pilkada dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024, bersamaan dengan dilaksanakannya Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif.

Dalam menyusun RKPD Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan menerapkan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*), dan bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan politik merupakan pendekatan perencanaan pembangunan yang berasal dari proses politik. RKPD Tahun 2023 disusun mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi tahun 2023.

Perencanaan melalui pendekatan teknokratis dilaksanakan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dilaksanakan oleh lembaga atau perangkat daerah yang secara fungsi memiliki tugas untuk itu. Perangkat Daerah menyusun perencanaan pembangunan mengacu pada fungsi dan tugas yang telah ditetapkan melalui peraturan daerah masing-masing.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholder*) terhadap pembangunan, di mana pelibatan para pihak tersebut dimaksudkan untuk menjaring aspirasi dan menumbuhkembangkan rasa memiliki. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

Disamping pendekatan-pendekatan tersebut di atas dan selaras dengan RKP 2023, Penyusunan RKPD 2023 dengan prinsip *money follow program* menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial dengan penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Penguatan implementasi *Money Follow Program* dilakukan melalui penajaman kesinambungan prioritas pembangunan, pengendalian pelaksanaan program dengan penerapan standarisasi kegiatan yang

mendukung pencapaian indikator program, dan penajaman integrasi sumber pendanaan.

Penguatan pendekatan Tematik-Holistik, Integratif dan Spasial dilakukan dengan memperhatikan pada pengendalian perencanaan, penguatan perencanaan. Penguatan perencanaan berbasis kewilayahan dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing wilayah, dan penguatan integrasi sumber pendanaan pembangunan. Dengan penerapan seluruh pendekatan perencanaan tersebut di dalam penyusunannya, maka diharapkan dokumen RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 dapat menjadi dokumen perencanaan yang memenuhi prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan dan kesinambungan kemajuan dan kesatuan Nasional.

Selain hal tersebut, sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diantaranya sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program yang ditetapkan dalam RPDP kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah;
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD);
3. RKPD merupakan acuan Pj. Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan;

Memperhatikan posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka diharapkan dapat dihasilkan suatu dokumen perencanaan yang berkualitas dengan mempedomani peraturan perundangan yang berlaku, terutama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD ditetapkan agar dapat memberikan acuan yang efektif bagi pembangunan.

Beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam penyusunan dokumen RKPD, antara lain sebagai berikut:

1. RKPD tahun rencana disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya;
2. Program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJPD, RKP dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta dengan memperhatikan visi dan misi Kepala Daerah terpilih;
3. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*) untuk program dan indikator kinerja keluaran (*output*) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur;
5. Program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017, RKPD disusun melalui tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan RKPD (Pasal 73) meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
 - b. orientasi mengenai RKPD;
 - c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
 - d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan rancangan awal RKPD (Pasal 79) meliputi:
- a. Perumusan rancangan awal RKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:
 - 1) analisis gambaran umum kondisi daerah;
 - 2) analisis rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - 3) analisis kapasitas riil keuangan daerah;
 - 4) penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
 - 5) perumusan permasalahan pembangunan daerah;
 - 6) penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
 - 7) penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
 - 8) penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
 - 9) penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
 - 10) perumusan prioritas pembangunan daerah; dan
 - 11) perumusan rencana kerja program dan pendanaan.
 - b. Penyajian rancangan awal RKPD
 Rancangan awal RKPD disajikan dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:
 - 1) pendahuluan;
 - 2) gambaran umum kondisi daerah;
 - 3) kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
 - 4) sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
 - 5) arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota;
 - 6) rancangan kerja dan pendanaan daerah;
 - 7) kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - 8) penutup.

3. Penyusunan rancangan RKPD (Pasal 85)

Penyusunan rancangan RKPD adalah proses penyempurnaan rancangan awal RKPD provinsi berdasarkan:

- a. rancangan awal Rencana Kerja seluruh Perangkat Daerah provinsi yang telah diverifikasi; dan
- b. hasil penelaahan terhadap rancangan awal RKP dan program strategis nasional.

4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD.

Musrenbang RKPD dilakukan dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD yang mencakup:

- 1) menyepakati permasalahan pembangunan daerah;
- 2) menyepakati prioritas pembangunan daerah;
- 3) menyepakati arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota lingkup provinsi;
- 4) menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi;
- 5) penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional; dan
- 6) klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan provinsi dengan program dan kegiatan kabupaten/kota yang diusulkan berdasarkan hasil musrenbang kabupaten/kota.

5. Perumusan rancangan akhir RKPD

Perumusan rancangan akhir RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD dan bertujuan untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD serta sebagai bahan penyusunan Perkada tentang RKPD.

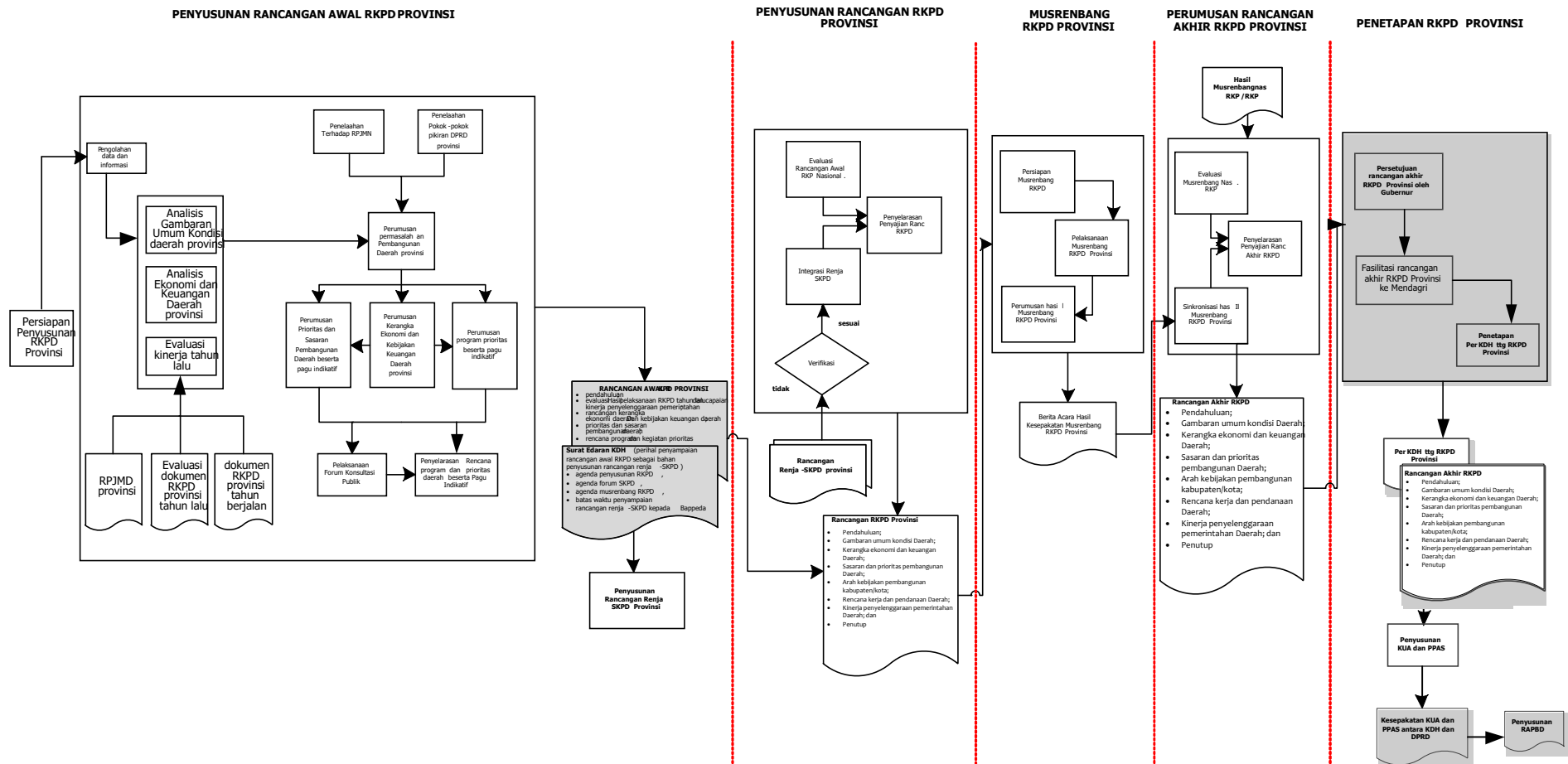
6. Penetapan RKPD

- 1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan dijadikan sebagai:

- a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - b. pedoman penyalarsan prioritas pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota; dan
 - c. pedoman penyusunan rancangan kebijakan umum APBD Provinsi serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi.
- 2) Rancangan kebijakan umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disampaikan Gubernur kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.

Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 memiliki makna yang strategis karena merupakan penjabaran tahap ketiga dari RPJPD 2005-2025 dan merupakan tahun pertama kelima dari pelaksanaan RPJMN 2020-2024. Serta pelaksanaan tahun pertama RPDP 2023-2026. RKPD yang telah ditetapkan digunakan sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Gambar I.1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 – 2034);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dalam menyusun dokumen RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperhatikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 merupakan bagian dari penerapan sistem perencanaan pembangunan nasional, dan bagian dari penerapan

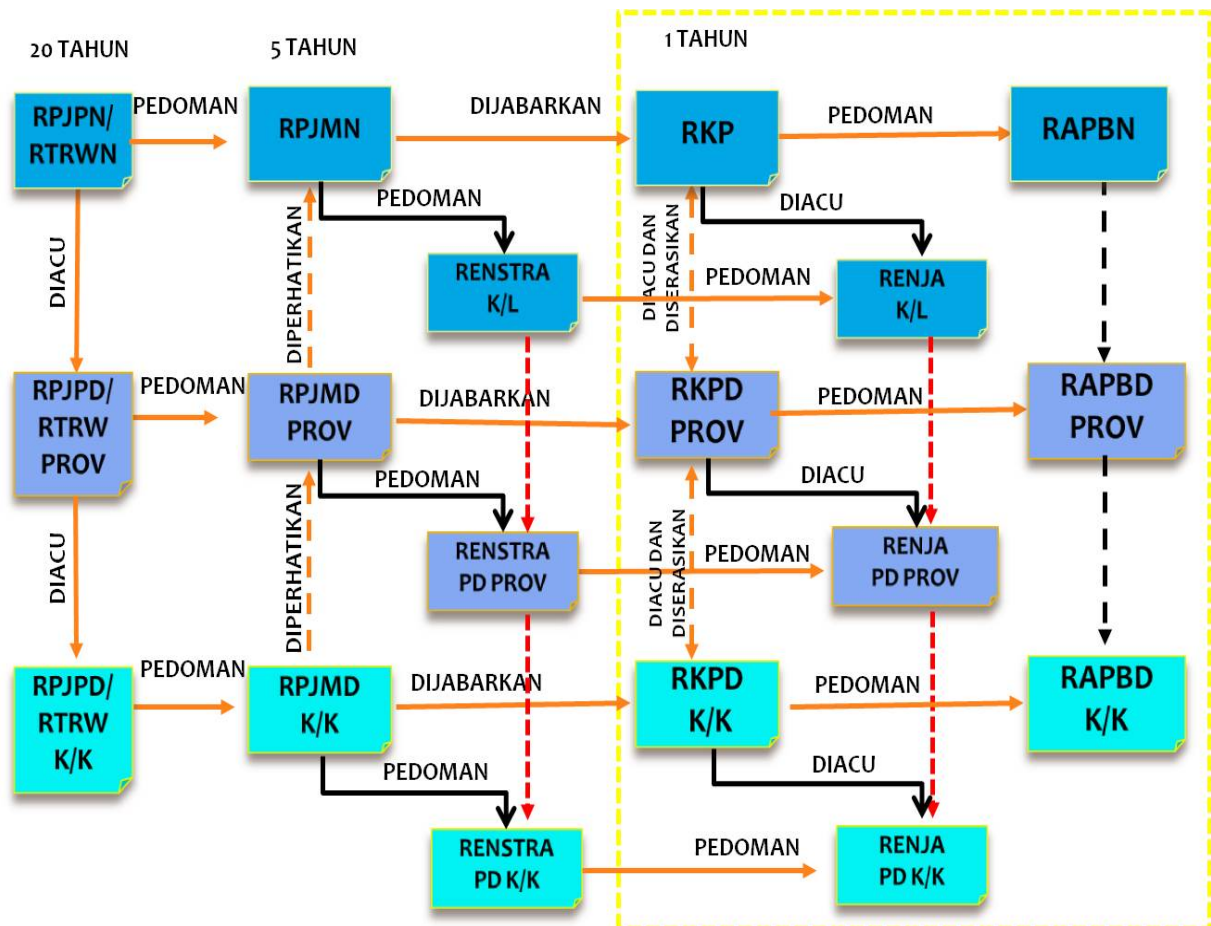
sistem perencanaan dan penganggaran terpadu. RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan kebijakan tingkat nasional, yang mengacu pada RKP Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2020-2024 serta Renstra masing-masing Kementerian dan Lembaga Pemerintah non Kementerian di tingkat pusat. Dalam konteks daerah, dokumen RKPD Tahun 2023 juga disusun dengan berpedoman pada Perubahan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 dan RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.

Dokumen-dokumen perencanaan sebagaimana tersebut di atas yang bersifat spasial perlu disinkronisasikan dengan dokumen-dokumen perencanaan spasial, yaitu dokumen RTRW Nasional, RTR Pulau dan RTR Kawasan Strategis Nasional pada level Pemerintah Pusat dan dokumen RTRW Daerah, RDTR serta RTR Kawasan Strategis Daerah. Dokumen RTRW Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah. Dengan demikian, korelasi antara RKPD dengan dokumen perencanaan spasial (RTRW Daerah) terletak pada hubungannya dengan dokumen antara RPJP Daerah dan RPDP, yang sama-sama diselaraskan ke dalam dokumen RKPD.

Berdasarkan kondisi di atas, maka keterkaitan antar dokumen perencanaan, spasial dan penganggaran adalah sebagaimana pada Gambar I.2 berikut.

Gambar 1.2

Hubungan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional, Daerah, dan Perangkat Daerah



Sumber: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (diolah)

1.4 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun dengan maksud untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki guna peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan.

Adapun tujuannya adalah sebagai acuan bagi seluruh Instansi/Kantor Wilayah/Lembaga Teknis Daerah/Dinas Daerah/Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Tahun Anggaran 2023.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah (Tabel T-C.29)
- 2.2. Analisi Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-C.30)
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD (Tabel T-C.31)
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Tabel T-C.32)

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 3.4 Program dan Kegiatan (Tabel T-C.33)

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Mengemukakan rencana kerja program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif yang disajikan dalam tabel matrik.

BAB V PENUTUP

Berisi uraian penutup dari Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2023.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Dengan memperhatikan pembangunan bidang pada RKP tahun 2021 dan program prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada RKPD tahun 2021 maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 mencakup 5 program, 12 kegiatan dan 28 sub kegiatan pada Dinas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi, 1 Program, 3 kegiatan dan 13 sub kegiatan pada Cabang Dinas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Bangka; 1 Program, 3 Kegiatan dan 11 sub kegiatan pada Cabang Dinas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Bangka Barat; 1 Program, 3 Kegiatan dan 13 sub kegiatan pada Cabang Dinas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan; 1 Program, 3 Kegiatan dan 12 sub kegiatan pada Cabang Dinas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Belitung; serta 1 Program, 3 Kegiatan dan 12 sub kegiatan pada Cabang Dinas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Belitung Timur.

Untuk memastikan keselarasan antara program kegiatan yang ada di Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2021 dengan Revisi Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2017-2022, maka berikut ini disajikan perbandingan pada Tabel di bawah ini.

NO	Program/kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Program/kegiatan di dalam Revisi Renstra Perangkat Daerah 2021-2022	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
A. DINAS ESDM PROVINSI			
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Sesuai
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sesuai
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sesuai
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sesuai
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sesuai
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sesuai
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sesuai
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sesuai
II	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Sesuai
8	Kegiatan Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, Dan Pengusahaan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	Kegiatan Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, Dan Pengusahaan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	Sesuai
III	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Sesuai

NO	Program/kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Program/kegiatan di dalam Revisi Renstra Perangkat Daerah 2021-2022	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
9	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Sesuai
IV	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Sesuai
10	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Sesuai
V	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Sesuai
11	Penatausahaan Izin Operasi Yang Fasilitas Instalasi Dalam Provinsi	Penatausahaan Izin Operasi Yang Fasilitas Instalasi Dalam Provinsi	Sesuai
12	Penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang daerah terpencil dan perdesaan	Penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang daerah terpencil dan perdesaan	Sesuai
B. CABANG DINAS ESDM WILAYAH BANGKA			
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Sesuai
13	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sesuai
14	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sesuai
15	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sesuai

NO	Program/kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Program/kegiatan di dalam Revisi Renstra Perangkat Daerah 2021-2022	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
C. CABANG DINAS ESDM WILAYAH BANGKA BARAT			
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Sesuai
16	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sesuai
17	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sesuai
18	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sesuai
D. CABANG DINAS ESDM WILAYAH BANGKA TENGAH DAN BANGKA SELATAN			
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Sesuai
19	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sesuai
20	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sesuai
21	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sesuai
E. CABANG DINAS ESDM WILAYAH BELITUNG			
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Sesuai
22	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sesuai
23	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sesuai
24	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sesuai

NO	Program/kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Program/kegiatan di dalam Revisi Renstra Perangkat Daerah 2021-2022	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
F. CABANG DINAS ESDM WILAYAH BELITUNG TIMUR			
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Sesuai
25	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sesuai
26	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sesuai
27	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sesuai

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
dan Pencapaian Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral s/d Tahun 2021
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Lembar:

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3				URUSAN PEMERINTAH PILIHAN									
3	29			URUSAN PEMERINTAH BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL									
3	29	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
3	29	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	25 dokumen	15 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100%	5 dokumen	25 dokumen	100%
3	29	01	1.02	Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen	10	6 dokumen	2	2	100%	2 dokumen	10 dokumen	100%

				Perangkat Daerah	keuangan	dokumen		dokumen	dokumen				
3	29	01	1.05	Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	30 pegawai	0	0	0	0%	0	0	0%
3	29	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum PD yang tersedia	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
3	29	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	1 unit	0	0	0	0%	0	0	0%
3	29	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan PD yang tersedia	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
3	29	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
3	29	02		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN									
3	29	02	1.02	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusaha Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusaha Air Tanah	2 laporan	0	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	2 laporan	100%
3	29	03		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA									

3	29	03	1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah laporan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	2 laporan	0	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	2 laporan	100%
3	29	04		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN									
3	29	04	1.04	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Jumlah laporan Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	2 laporan	0	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	2 laporan	100%
3	29	06		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN									
3	29	06	1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalm Daerah Provinsi	Jumlah laporan Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalm Daerah Provinsi	2 laporan	0	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	2 laporan	100%
3	29	06	1.03	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah laporan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil	2 laporan	0	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	2 laporan	100%

					dan Perdesaan								
3	29			URUSAN PEMERINTAH BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL CABANG DINAS WILAYAH BANGKA									
3	29	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI									
3	29	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum PD yang tersedia	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
3	29	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan PD yang tersedia	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
3	29	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
3	29			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL CABANG DINAS WILAYAH BANGKA BARAT									
3	29	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH									

3	29	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum PD yang tersedia	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
3	29	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan PD yang tersedia	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
3	29	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
3	29			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL CABANG DINAS WILAYAH BANGKA TENGAH DAN SELATAN									
3	29	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH									
3	29	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum PD yang tersedia	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
3	29	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan PD yang tersedia	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
3	29	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%

3	29			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL CABANG DINAS WILAYAH BELITUNG									
3	29	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH									
3	29	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum PD yang tersedia	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
3	29	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan PD yang tersedia	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
3	29	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
3	29			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL CABANG DINAS WILAYAH BELITUNG TIMUR									
3	29	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH									
3	29	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum PD yang tersedia	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
3	29	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan PD yang tersedia	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%

3	29	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
---	----	----	------	---	---	----------	----------	----------	----------	------	----------	----------	------

Berdasarkan rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sampai dengan tahun 2021, dapat dilihat bahwa terdapat capaian program dan kegiatan sudah terlaksana dengan baik yaitu mencapai 100% dan terdapat program dan kegiatan yang belum mencapai hasil yang maksimal. Hal ini bukan merupakan kinerja yang tidak berhasil pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, namun tidak terlaksananya program dan kegiatan tersebut merupakan hasil dari refocusing anggaran yang disebabkan oleh pandemi covid-19 yang terjadi pada tahun 2021.

Sejak berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu kewenangan pemerintah provinsi terhadap pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pendelegasian terhadap pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan hingga akhir tahun 2021 belum ada. Sehingga porsi anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2021 lebih bersifat Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah provinsi.

Dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2021, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada sisi pendapatan sebesar Rp.1.695.122.000,- pada APBD dan menjadi Rp.1.695.122.000,- pada APBDP (tidak mengalami perubahan) dan pada sisi belanja sebesar Rp.21.850.230.757,- pada APBD dan menjadi Rp. 21.037.246.154,- pada APBDP (mengalami perubahan atau pengurangan sebesar Rp.812.984.603,- atau 3,7%).

Realisasi Pendapatan pada tahun 2021 sebesar Rp.232.600.00,- atau sebesar 14%, sementara realisasi belanja pada tahun 2021 sebesar Rp.19.121.560.430,- atau sebesar 90,89% dengan sisa anggaran sebesar Rp..1.915.685.724,- atau sebesar 9,11%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Capaian target kinerja pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menggambarkan keberhasilan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran, ditetapkan indikator untuk mencapai target capaian. Pada Perubahan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2017-2022, terdapat 3 (tiga) tujuan dengan 5 (lima) sasaran yang disajikan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel Perubahan Tujuan dan Sasaran Renstra
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 2017-2022**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Produksi sektor Pertambangan	Peningkatan pengelolaan pertambangan	Persentase pembinaan dan pengawasan pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan	50%	65%	70%	75%	80%
2	Mewujudkan Ketahanan Energi	Peningkatan ketersediaan Energi Listrik	Persentase Ratio Elektrifikasi	99,48%	99,90%	99,90%	99,99%	99,99%
		Peningkatan penggunaan Bauran Energi	Persentase Bauran Energi Baru Terbarukan		8,82%	9,33%	10,68%	10,94%
3	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B-	BB	BB	BB	A
		Meningkatkan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Persentase Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	85%	90%	90%	95%	95%

**Tabel Rincian Capaian IKU
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2021**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

1	Peningkatan Pengelolaan Pertambangan	Persentase pembinaan dan pengawasan pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan	75%	0	0
2	Peningkatan ketersediaan Energi Listrik	Persentase Ratio Elektrifikasi	99,99%	99,99%	100%
		Persentase Bauran Energi Baru Terbarukan	10,60%	8,88%	83,77%

Tidak tercapainya atau tidak dilaksanakannya pembinaan dan pengawasan terhadap WIUP aktif tidak lain disebabkan dengan berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu kewenangan pemerintah provinsi terhadap pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pendelegasian terhadap pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan hingga saat ini belum ada.

Tingkat indikator capaian kinerja untuk indikator kinerja Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pertambangan Yang Berwawasan Lingkungan tidak tercapai atau 0%, hal ini disebabkan tidak dapat dilaksanakannya pembinaan dan pengawasan (adanya UU Nomor 3 Tahun 2020). Persentase Ratio Elektrifikasi tercapai yaitu dari target 99,99%, tercapai 99,99% (dengan capaian kinerja 100%). Sementara tingkat indikator capaian kinerja untuk indikator kinerja Persentase Bauran Energi Baru Terbarukan tidak tercapai yaitu dari target 10,60%, tercapai 8,80% (dengan capaian kinerja 83,77%).

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase pembinaan dan pengawasan pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan			70%	75%	80%	85%			80%	85%	Capaian tidak tercapai pada Realisasi 2021 (thn n-1)
2	Persentase Ratio Elektrifikasi			99.48%	99.90%	99.99%	99.99%		99.90%	99.90%	99.90%	Capaian tercapai pada Realisasi 2021 (thn n-1)
3	Persentase Bauran Energi Baru Terbarukan			9.33%	10.68%	10.94%	12.32%		8.88%	10.94%	12.32%	Capaian tidak tercapai pada Realisasi 2021 (thn n-1)
4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			BB	BB	A	A			A	A	
5	Persentase Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah			95%	95%	95%	95%			95%	95%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Untuk melaksanakan tujuan dan sasaran RKPD, perlu ditetapkan indikator sasaran. Sebelum menetapkan tujuan, sasaran serta indikator sasaran, perlu ditetapkan isu-isu strategis yang diperoleh dari permasalahan yang terjadi. Permasalahan merupakan hasil investigasi, sementara isu merupakan proyeksi dari hasil investigasi dari permasalahan yang terjadi.

Dengan memperhatikan RPJPD 2005 – 2025 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, RPJM Nasional 2020 – 2024, RPJMD Provinsi Tetangga yang berbatasan dan terdekat, permasalahan yang ada, isu-isu strategis, serta capaian kinerja 5 (lima) tahun yang lalu (2017-2022), maka dengan menggunakan penyelarasan serta analisis SWOT, ditetapkan tujuan dalam RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya ekonomi daerah
2. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM
3. Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi
4. Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi
5. Menurunnya dispritas pembangunan antar wilayah
6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam

Kemudian untuk mencapai tujuan dalam RPD dimaksud, ditetapkan 20 (dua puluh) sasaran. Untuk Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menjurus pada tujuan ke 1 yaitu **“Meningkatnya ekonomi daerah”**, sedangkan sasaran yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut yaitu sasaran ke 3 yaitu **“Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan dan Penggalan”**. Sehingga untuk tujuan dan sasaran perlu dilaksanakan strategi **“Meningkatkan tata kelola sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan”**.

Berdasarkan kriteria dan identifikasi permasalahan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2023 – 2026 sebagai berikut:

1. Belum tercapainya tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral;
2. Belum tercapainya “Ketahanan Energi”.

Isu-isu penting di atas, didukung dari data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada Desember 2021, BPS mencatat nilai ekspor timah dan non timah mencapai \$ 317,78 juta yang memberikan sumbangan besar terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang disebabkan dengan tingginya harga dan permintaan pasar dunia. Sementara dilihat dari pertumbuhan sub sektor pertambangan dan penggalan mengalami penurunan dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Pertumbuhan cenderung negatif, namun pada tahun 2021 pertumbuhan menjadi positif dengan membaiknya harga pasar dunia terhadap produksi timah.

Rasio Elektrifikasi (RE) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang belum stabil, dengan mempertimbangkan kebutuhan akan energi baik industri maupun rumah tangga yang terus meningkat. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengupayakan “surplus energi” (kemandirian dan ketahanan energi) yang artinya Provinsi Bangka Belitung dapat memenuhi kebutuhan sendiri dan mensuplai energi ke daerah lain (daerah terdekat di pulau sumatera).

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka menyusun Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan rancangan

yang disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam dokumen RPD Tahun 2023 -2026. Tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPD 2023 -2026 tetap mengacu pada RPJPD 2005 – 2025. Kesesuaian rumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam perubahan RPD 2023 – 2026 dengan RPJPD Tahun 2005 – 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	RPD		RPJPD		Ket
	Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran	
1	Meningkatnya ekonomi daerah	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian	Mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi daerah berbasis agri-bahari	Meningkatnya ekonomi daerah	sesuai

Selanjutnya keterhubungan dan kesesuaian sasaran pokok, strategi dan arah kebijakan pembangunan dalam dokumen RPD Tahun 2023 – 2026 dengan dokumen RPJPD Tahun 2005 – 2025 tersaji pada tabel di bawah ini :

No	RPD		RPJPD		Ket
	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan	
1	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian	Peningkatan tata kelola sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan		Peningkatan tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral	sesuai
				Pemenuhan energi listrik dan peningkatan rasio elektrifikasi	

Adapun review terhadap rancangan awal RKPD pada DinasEnergi dan Sumber Daya Mineral disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Lembar.....dari.....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung					30.104.718.350					30.169.718.350	
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral					27.131.628.350					27.131.628.350	
Urusan Pemerintahan Pilihan					27.131.628.350	Urusan Pemerintahan Pilihan				27.131.628.350	
Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral					27.131.628.350	Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral				27.131.628.350	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				22.656.628.350	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				22.656.628.350	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 dokumen	195.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 dokumen	195.000.000	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	95%	17.590.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	95%	17.590.000.000	
	Adminitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	95%	50.000.000	Adminitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	95%	50.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	95%	175.600.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	95%	175.600.000	
	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	95%	1.212.828.350	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	95%	1.212.828.350	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	95%	2.050.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	95%	2.050.000.000	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	95%	1.058.200.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	95%	1.058.200.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	95%	325.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	95%	325.000.000	
2	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian				1.435.000.000	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian				1.435.000.000	
	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah dokumen Terkait Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 dokumen	550.000.000	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah dokumen Terkait Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 dokumen	550.000.000	

	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah dokumen Terkait Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 dokumen	435.000.000	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah dokumen Terkait Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 dokumen	435.000.000	
	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah dokumen terkait Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 dokumen	450.000.000	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah dokumen terkait Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 dokumen	450.000.000	
3	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara				1.555.000.000	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara				1.555.000.000	

Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah dokumen Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 dokumen	200.000.000	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah dokumen Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 dokumen	200.000.000
---	------------------------------------	--	-----------	-------------	---	------------------------------------	--	-----------	-------------

	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah dokumen Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	1 dokumen	200.000.000	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah dokumen Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	1 dokumen	200.000.000	
	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah dokumen Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan	1 dokumen	300.000.000	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah dokumen Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan	1 dokumen	300.000.000	

			Rakyat					Rakyat			
	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah dokumen Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	1 dokumen	45.000.000	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah dokumen Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	1 dokumen	45.000.000	

Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah dokumen Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	1 dokumen	300.000.000	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah dokumen Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	1 dokumen	300.000.000
---	------------------------------------	--	-----------	-------------	---	------------------------------------	--	-----------	-------------

	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah dokumen Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	1 dokumen	100.000.000	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah dokumen Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	1 dokumen	100.000.000	
	Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah dokumen Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	1 dokumen	20.000.000	Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah dokumen Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	1 dokumen	20.000.000	

	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah dokumen Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	1 dokumen	40.000.000	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah dokumen Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	1 dokumen	40.000.000	
	Penatausahaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah dokumen Penatausahaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam	1 dokumen	20.000.000	Penatausahaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah dokumen Penatausahaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam	1 dokumen	20.000.000	
	Penatausahaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah dokumen Penatausahaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	1 dokumen	20.000.000	Penatausahaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah dokumen Penatausahaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	1 dokumen	20.000.000	

	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah dokumen Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam	1 dokumen	20.000.000	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah dokumen Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam	1 dokumen	20.000.000	
	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah dokumen Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	1 dokumen	20.000.000	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah dokumen Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	1 dokumen	20.000.000	
	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah dokumen Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan	1 dokumen	20.000.000	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah dokumen Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan	1 dokumen	20.000.000	

	Pembinaan dan pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah dokumen Pembinaan dan pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	1 dokumen	250.000.000	Pembinaan dan pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah dokumen Pembinaan dan pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	1 dokumen	250.000.000	
4	Program Pengelolaan Energi Terbarukan				560.000.000	Program Pengelolaan Energi Terbarukan				560.000.000	
	Pelaksanaan Konservasi Energi di wilayah Provinsi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah dokumen Pelaksanaan Konservasi Energi di wilayah Provinsi	1 dokumen	560.000.000	Pelaksanaan Konservasi Energi di wilayah Provinsi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			560.000.000	
5	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan				925.000.000	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan				925.000.000	
	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah dokumen terkait Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	1 dokumen	350.000.000	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah dokumen terkait Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	1 dokumen	350.000.000	

	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah dokumen Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	1 dokumen	225.000.000	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah dokumen Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	1 dokumen	225.000.000	
--	--	------------------------------------	---	-----------	-------------	--	------------------------------------	---	-----------	-------------	--

	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah dokumen Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 dokumen	350.000.000	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah dokumen Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 dokumen	350.000.000	
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Cabdin Wilayah Bangka)					502.140.000					502.140.000	
Urusan Pemerintahan Pilihan					502.140.000	Urusan Pemerintahan Pilihan				502.140.000	
Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral					502.140.000	Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral				502.140.000	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				382.140.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				382.140.000	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cabdin Wilayah Bangka	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	95%	25.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cabdin Wilayah Bangka	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	95%	25.000.000	
	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Cabdin Wilayah Bangka	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	95%	101.100.000	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Cabdin Wilayah Bangka	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	95%	101.100.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Cabdin Wilayah Bangka	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	95%	30.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Cabdin Wilayah Bangka	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	95%	30.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintah Daerah	Cabdin Wilayah Bangka	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	95%	170.700.000	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintah Daerah	Cabdin Wilayah Bangka	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	95%	170.700.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Cabdin Wilayah Bangka	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	95%	55.340.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Cabdin Wilayah Bangka	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	95%	55.340.000	

2	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian				30.000.000	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian				30.000.000	
	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Cabdin Wilayah Bangka	Jumlah dokumen Terkait Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 dokumen	30.000.000	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Cabdin Wilayah Bangka	Jumlah dokumen Terkait Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 dokumen	30.000.000	
3	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara				30.000.000	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara				30.000.000	

	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Cabdin Wilayah Bangka	Jumlah dokumen Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 dokumen	30.000.000	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Cabdin Wilayah Bangka	Jumlah dokumen Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 dokumen	30.000.000	
4	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan				60.000.000	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan				60.000.000	
	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Cabdin Wilayah Bangka	Jumlah dokumen terkait Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	1 dokumen	60.000.000	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Cabdin Wilayah Bangka	Jumlah dokumen terkait Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	1 dokumen	60.000.000	
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Cabdin Wilayah Bangka Barat)					904.600.000					904.600.000	
Urusan Pemerintahan Pilihan					904.600.000	Urusan Pemerintahan Pilihan				904.600.000	

Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral					904.600.000	Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral				904.600.000	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				799.600.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				799.600.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cabdin Wilayah Bangka Barat	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	95%	25.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cabdin Wilayah Bangka Barat	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	95%	25.000.000	
	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Cabdin Wilayah Bangka Barat	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	95%	130.500.000	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Cabdin Wilayah Bangka Barat	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	95%	130.500.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Cabdin Wilayah Bangka Barat	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	95%	150.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Cabdin Wilayah Bangka Barat	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	95%	150.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintah Daerah	Cabdin Wilayah Bangka Barat	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	95%	294.100.000	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintah Daerah	Cabdin Wilayah Bangka Barat	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	95%	294.100.000	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Cabdin Wilayah Bangka Barat	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	95%	200.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Cabdin Wilayah Bangka Barat	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	95%	200.000.000	
2	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara				70.000.000	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara				70.000.000	
	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Cabdin Wilayah Bangka Barat	Jumlah dokumen Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 dokumen	70.000.000	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Cabdin Wilayah Bangka Barat	Jumlah dokumen Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 dokumen	70.000.000	
3	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan				35.000.000	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan				35.000.000	

	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Cabdin Wilayah Bangka Barat	Jumlah dokumen terkait Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	1 dokumen	35.000.000	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Cabdin Wilayah Bangka Barat	Jumlah dokumen terkait Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	1 dokumen	35.000.000	
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Cabdin Wilayah Bangka Tengah dan Selatan)					501.450.000					531.450.000	
Urusan Pemerintahan Pilihan					501.450.000	Urusan Pemerintahan Pilihan				531.450.000	
Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral					501.450.000	Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral				531.450.000	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				441.450.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				441.450.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cabdin Wilayah Bangka Tengah dan Selatan	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	95%	25.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cabdin Wilayah Bangka Tengah dan Selatan	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	95%	25.000.000	
	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Cabdin Wilayah Bangka Tengah dan Selatan	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	95%	125.750.000	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Cabdin Wilayah Bangka Tengah dan Selatan	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	95%	125.750.000	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cabdin Wilayah Bangka Tengah dan Selatan	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	95%	185.700.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cabdin Wilayah Bangka Tengah dan Selatan	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	95%	185.700.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Cabdin Wilayah Bangka Tengah dan Selatan	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	95%	105.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Cabdin Wilayah Bangka Tengah dan Selatan	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	95%	105.000.000	
2	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara				35.000.000	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara				30.000.000	
	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Cabdin Wilayah Bangka Tengah dan Selatan	Jumlah dokumen Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 dokumen	35.000.000	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Cabdin Wilayah Bangka Tengah dan Selatan	Jumlah dokumen Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 dokumen	30.000.000	
3	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan				25.000.000	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan				60.000.000	

	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Cabdin Wilayah Bangka Tengah dan Selatan	Jumlah dokumen terkait Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	1 dokumen	25.000.000	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Cabdin Wilayah Bangka Tengah dan Selatan	Jumlah dokumen terkait Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	1 dokumen	60.000.000	
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Cabdin Wilayah Belitung)					485.200.000					520.200.000	
Urusan Pemerintahan Pilihan					485.200.000	Urusan Pemerintahan Pilihan				520.200.000	
Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral					485.200.000	Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral				520.200.000	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				400.200.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				400.200.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cabdin Wilayah Belitung	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	95%	35.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cabdin Wilayah Belitung	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	95%	35.000.000	
	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Cabdin Wilayah Belitung	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	95%	160.000.000	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Cabdin Wilayah Belitung	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	95%	160.000.000	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cabdin Wilayah Belitung	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	95%	145.200.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cabdin Wilayah Belitung	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	95%	145.200.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Cabdin Wilayah Belitung	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	95%	60.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Cabdin Wilayah Belitung	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	95%	60.000.000	
2	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara				60.000.000	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara				60.000.000	
	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Cabdin Wilayah Belitung	Jumlah dokumen Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 dokumen	60.000.000	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Cabdin Wilayah Belitung	Jumlah dokumen Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 dokumen	60.000.000	
3	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan				25.000.000	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan				60.000.000	

	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Cabdin Wilayah Belitung	Jumlah dokumen terkait Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	1 dokumen	25.000.000	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Cabdin Wilayah Belitung	Jumlah dokumen terkait Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	1 dokumen	60.000.000	
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Cabdin Wilayah Belitung Timur)					579.700.000					579.700.000	
Urusan Pemerintahan Pilihan					579.700.000	Urusan Pemerintahan Pilihan				579.700.000	
Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral					579.700.000	Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral				579.700.000	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				439.700.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				439.700.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cabdin Wilayah Belitung Timur	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	95%	25.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cabdin Wilayah Belitung Timur	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	95%	25.000.000	
	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Cabdin Wilayah Belitung Timur	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	95%	152.500.000	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Cabdin Wilayah Belitung Timur	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	95%	152.500.000	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cabdin Wilayah Belitung Timur	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	95%	157.200.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cabdin Wilayah Belitung Timur	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	95%	157.200.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Cabdin Wilayah Belitung Timur	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	95%	105.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Cabdin Wilayah Belitung Timur	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	95%	105.000.000	
2	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara				105.000.000	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara				105.000.000	
	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Cabdin Wilayah Belitung Timur	Jumlah dokumen Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 dokumen	105.000.000	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Cabdin Wilayah Belitung Timur	Jumlah dokumen Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 dokumen	105.000.000	
3	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan				35.000.000	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan				35.000.000	

	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Cabdin Wilayah Belitung Timur	Jumlah dokumen terkait Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	1 dokumen	35.000.000	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Cabdin Wilayah Belitung Timur	Jumlah dokumen terkait Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	1 dokumen	35.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat melalui Forum Trilateral Meeting antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan tatacara perencanaan. Melalui Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Forum Trilateral Meeting difasilitasi untuk mencapai kesesuaian dan kesepakatan antara program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Selain Trilateral Meeting, melalui forum Musrenbang Provinsi dihasilkan dokumen perencanaan yang tertuang dalam Berita Acara Musrenbang. Dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Kepmendagri Nomor 050-5778 Tahun 2021, telah dijabarkan mengenai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

Terdapat beberapa usulan yang disampaikan oleh pemerintah kabupaten/kota pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, namun bukan merupakan kewenangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga tidak dapat diuraikan ke dalam program dan kegiatan yang ada dalam rancangan awal RKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyelenggaraan pembangunan tidak hanya di pemerintah pusat, namun juga diselenggarakan di pemerintah daerah. Selanjutnya pemerintah daerah melalui Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan secara terus menerus, berkelanjutan dan berkesinambungan. Kebijakan pemerintah daerah tentu saja merujuk kepada kebijakan yang disusun pemerintah pusat melalui kebijakan nasional.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dalam hal ini pemerintah pusat mengusung tema “Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”. Terdapat 8 (delapan) arah kebijakan yaitu :

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
2. Peningkatan kualitas SDM : kesehatan dan pendidikan
3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job
4. Mendorong pemulihan dunia usaha
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim)
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain : air bersih dan sanitasi
8. Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)

Sementara itu rancangan tema dan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 mengambil tema “Penguatan Perekonomian, SDM dan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Dengan Cerdas dan Berwawasan Lingkungan”.

Untuk melaksanakan tema pembangunan yang dicanangkan untuk tahun 2023, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan Prioritas Pembangunan Daerah yaitu :

1. Penguatan dan peningkatan perekonomian daerah
2. Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM
3. Peningkatan partisipasi publik dan Tatakelola Pemerintahan
4. Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat
5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam

Berdasarkan RKP Tahun 2023 dan RKPD Tahun 2023 yang dirancang, dapat diketahui bahwa adanya keterkaitan antara RKP Tahun 2023 dengan RKPD Tahun 2023. Dengan demikian pembangunan yang dilaksanakan di daerah ikut mendukung pembangunan pemerintah pusat (nasional). Sehingga secara garis besar tujuan pembangunan nasional dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.

Melalui dokumen Renstra Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020 – 2024, visi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral selama 5 tahun yaitu **“Menjadi Penggerak Utama Pembangunan Nasional Melalui Pengelolaan ESDM yang optimal Demi Terwujudnya Kemandirian dan Ketahan Energi Untuk Kesejahteraan Rakyat Yang Adil dan Merata”**.

Energi tidak lagi dijadikan sebagai komoditi, namun sebagai modal pembangunan bangsa serta memberikan jaminan ketersediaan energy yang adil dan merata dengan pemerataan pembangunan infrastruktur dan rasionalisasi harga energi. Begitu pula dalam pengelolaan sumber daya mineral dimana Pemerintah terus mengusahakan pembangunan infrastruktur pengolahan dan industri manufaktur turunan untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 dijabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebagai berikut :

**Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Tujuan 1 : Meningkatkan Produksi sektor Pertambangan		
Sasaran Strategis 1 : Peningkatan pengelolaan pertambangan	Persentase pembinaan dan pengawasan pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan	85%
Tujuan 2 : Mewujudkan Ketahanan Energi		
Sasaran Strategis 2 : Peningkatan ketersediaan Energi Listrik	Persentase Ratio Elektrifikasi	99,9%
Sasaran Strategis 3 : Peningkatan penggunaan Bauran Energi	Persentase Bauran Energi Baru Terbarukan	12,32%

3.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Energi dan SUMber Daya Mineral

Untuk melaksanakan tujuan dan sasaran RKPD, perlu ditetapkan indikator sasaran. Sebelum menetapkan tujuan, sasaran serta indikator sasaran, perlu ditetapkan isu-isu strategis yang diperoleh dari permasalahan yang terjadi. Permasalahan merupakan hasil investigasi,

sementara isu merupakan proyeksi dari hasil investigasi dari permasalahan yang terjadi.

Dengan memperhatikan RPJPD 2005 – 2025 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, RPJM Nasional 2020 – 2024, RPJMD Provinsi Tetangga yang berbatasan dan terdekat, permasalahan yang ada, isu-isu strategis, serta capaian kinerja 5 (lima) tahun yang lalu (2017-2022), maka dengan menggunakan penyelarasan serta analisis SWOT, ditetapkan tujuan dalam RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya ekonomi daerah
2. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM
3. Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi
4. Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi
5. Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah
6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam

Kemudian untuk mencapai tujuan dalam RPD dimaksud, ditetapkan 20 (dua puluh) sasaran. Untuk Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menjurus pada tujuan ke 1 yaitu **“Meningkatnya ekonomi daerah”**, sedangkan sasaran yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut yaitu sasaran ke 3 yaitu **“Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian”**. Sehingga untuk tujuan dan sasaran perlu dilaksanakan strategi **“Meningkatkan tata kelola sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan”**.

Berdasarkan kriteria dan identifikasi permasalahan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2023 – 2026 sebagai berikut:

1. Belum tercapainya tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral;
2. Belum tercapainya “Ketahanan Energi”.

Isu-isu penting di atas, didukung dari data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada Desember 2021, BPS mencatat nilai ekspor timah dan non timah mencapai \$ 317,78 juta yang memberikan sumbangan besar terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang disebabkan dengan tingginya harga dan permintaan pasar dunia. Sementara dilihat dari pertumbuhan sub sektor pertambangan dan penggalan mengalami penurunan dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Pertumbuhan cenderung negatif, namun pada tahun 2021 pertumbuhan menjadi positif dengan membaiknya harga pasar dunia terhadap produksi timah.

Rasio Elektrifikasi (RE) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang belum tercapai, dengan mempertimbangkan kebutuhan akan energi baik industri maupun rumah tangga yang terus meningkat. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengupayakan “surplus energi” (kemandirian dan ketahanan energi) yang artinya Provinsi Bangka Belitung dapat memenuhi kebutuhan sendiri dan mensupply energi ke daerah lain (daerah terdekat di pulau sumatera).

3.4 Program dan Kegiatan

Dalam melaksanakan tujuan dan sasaran RKPD, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan program dan kegiatan tahun 2023 serta Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan melalui Kepmendagri Nomor 050-5778 Tahun 2021. Terdapat pemutakhiran antara program dan kegiatan yang terdapat dalam dokumen perencanaan tahun 2022. Program dan kegiatan yang disusun dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Lembar Dari

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				30.104.718.350				28.330.790.000
	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral				27.131.628.350				25.547.700.000
3	URUSAN PEMERINTAH PILIHAN				27.131.628.350				25.547.700.000
3	29 URUSAN PEMERINTAH BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				27.131.628.350				25.547.700.000
3	29 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI				22.656.628.350				20.887.700.000

3	29	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11 dokumen	195.000.000	APBD		11 dokumen	250.000.000
3	29	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	95%	17.590.000.000	APBD		95%	18.110.000.000
3	29	01	1.03	Adminitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	95%	50.000.000	APBD		95%	50.000.000
3	29	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	95%	175.600.000	APBD		95%	-

3	29	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	95%	1.212.828.350	APBD		95%	1.242.500.000
3	29	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	95%	2.050.000.000	APBD		95%	-
3	29	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	95%	1.058.200.000	APBD		95%	1.065.200.000
3	29	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	95%	325.000.000	APBD		95%	170.000.000
3	29	02		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN				1.435.000.000				1.435.000.000

3	29	02	1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Terkait Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 dokumen	550.000.000	APBD		1 dokumen	550.000.000
3	29	02	1.02	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalan, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Terkait Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalan, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 dokumen	435.000.000	APBD		1 dokumen	435.000.000

3	29	02	1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah dokumen terkait Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 dokumen	450.000.000	APBD		1 dokumen	450.000.000
3	29	03		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA				1.555.000.000				1.790.000.000
3	29	03	1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah dokumen Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 dokumen	200.000.000	APBD		1 dokumen	225.000.000

3	29	03	1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah dokumen Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 dokumen	200.000.000	APBD		1 dokumen	225.000.000
---	----	----	------	---	--	------------------------------------	-----------	-------------	------	--	-----------	-------------

3	29	03	1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah dokumen Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 dokumen	300.000.000	APBD		1 dokumen	300.000.000
3	29	03	1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah dokumen Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 dokumen	45.000.000	APBD		1 dokumen	60.000.000

3	29	03	1.12	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah dokumen Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 dokumen	300.000.000	APBD		1 dokumen	350.000.000
---	----	----	------	---	--	------------------------------------	-----------	-------------	------	--	-----------	-------------

3	29	03	1.13	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah dokumen Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 dokumen	100.000.000	APBD		1 dokumen	125.000.000
3	29	03	1.14	Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Jumlah dokumen Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 dokumen	20.000.000	APBD		1 dokumen	25.000.000
3	29	03	1.15	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Jumlah dokumen Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 dokumen	40.000.000	APBD		1 dokumen	55.000.000

3	29	03	1.17	Penatausahaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam	Jumlah dokumen Penatausahaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 dokumen	20.000.000	APBD		1 dokumen	25.000.000
3	29	03	1.18	Penatausahaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Jumlah dokumen Penatausahaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 dokumen	20.000.000	APBD		1 dokumen	25.000.000
3	29	03	1.21	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam	Jumlah dokumen Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 dokumen	20.000.000	APBD		1 dokumen	25.000.000

3	29	03	1.22	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Jumlah dokumen Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 dokumen	20.000.000	APBD		1 dokumen	25.000.000
3	29	03	1.23	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan	Jumlah dokumen Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 dokumen	20.000.000	APBD		1 dokumen	25.000.000
3	29	03	1.24	Pembinaan dan pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	Jumlah dokumen Pembinaan dan pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 dokumen	250.000.000	APBD		1 dokumen	300.000.000
3	29	04		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN				560.000.000				510.000.000
3	29	04	1.04	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Jumlah dokumen Pelaksanaan Konservasi Energi di wilayah Provinsi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 dokumen	560.000.000	APBD		1 dokumen	510.000.000

3	29	06		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN				925.000.000				925.000.000
3	29	06	1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah dokumen terkait Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 dokumen	350.000.000	APBD		1 dokumen	350.000.000
3	29	06	1.05	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah dokumen Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayorita s Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 dokumen	225.000.000	APBD		1 dokumen	225.000.000

	3	29	1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah dokumen Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 dokumen	350.000.000	APBD		1 dokumen	350.000.000
				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Cabdin Wilayah Bangka)				502.140.000				492.140.000
3				URUSAN PEMERINTAH PILIHAN				502.140.000				492.140.000
3	29			URUSAN PEMERINTAH BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				502.140.000				492.140.000
3	29	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI				382.140.000				372.140.000
3	29	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Cabdin Wilayah Bangka	95%	25.000.000	APBD		1 dokumen	25.000.000
3	29	01	1.06	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Cabdin Wilayah Bangka	95%	101.100.000	APBD		1 dokumen	101.100.000

3	29	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Cabdin Wilayah Bangka	95%	30.000.000	APBD		1 dokumen	20.000.000
3	29	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Cabdin Wilayah Bangka	95%	170.700.000	APBD		1 dokumen	170.700.000
3	29	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Cabdin Wilayah Bangka	95%	55.340.000	APBD		1 dokumen	55.340.000
3	29	02		Program Pengelolaan Aspek Kegeologian				30.000.000				30.000.000
3	29	02	1.02	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalan, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Terkait Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalan, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Cabdin Wilayah Bangka	1 dokumen	30.000.000	APBD		1 dokumen	30.000.000
3	29	03		Program Pengelolaan Mineral dan Batubara				30.000.000				30.000.000

3	29	03	1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah dokumen Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Cabdin Wilayah Bangka	1 dokumen	30.000.000	APBD		1 dokumen	30.000.000
3	29	06		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan				60.000.000				60.000.000
3	29	06	1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah dokumen terkait Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Cabdin Wilayah Bangka	1 dokumen	60.000.000	APBD		1 dokumen	60.000.000
				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Cabdin Wilayah Bangka Barat)				904.600.000				694.600.000
3				URUSAN PEMERINTAH PILIHAN				904.600.000				694.600.000
3	29			URUSAN PEMERINTAH BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				904.600.000				694.600.000
3	29	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN								

				PEMERINTAH DAERAH				799.600.000				574.600.000
3	29	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Cabdin Wilayah Bangka Barat	95%	25.000.000	APBD		1 dokumen	25.000.000
3	29	01	1.06	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Cabdin Wilayah Bangka Barat	95%	130.500.000	APBD		1 dokumen	155.500.000
3	29	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Cabdin Wilayah Bangka Barat	95%	150.000.000	APBD		1 dokumen	-
3	29	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintah Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Cabdin Wilayah Bangka Barat	95%	294.100.000	APBD		1 dokumen	294.100.000
3	29	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Cabdin Wilayah Bangka Barat	95%	200.000.000	APBD		1 dokumen	100.000.000
3	29	03		Program Pengelolaan Mineral dan Batubara				70.000.000				80.000.000

3	29	03	1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah dokumen Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Cabdin Wilayah Bangka Barat	1 dokumen	70.000.000	APBD		1 dokumen	80.000.000
3	29	06		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan				35.000.000				40.000.000
3	29	06	1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah dokumen terkait Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Cabdin Wilayah Bangka Barat	1 dokumen	35.000.000	APBD		1 dokumen	40.000.000
				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Cabdin Wilayah Bangka Tengah dan Selatan)				501.450.000				531.450.000
3				URUSAN PEMERINTAH PILIHAN				501.450.000				531.450.000
3	29			URUSAN PEMERINTAH BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				501.450.000				531.450.000
3	29	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN								

				PEMERINTAH DAERAH				441.450.000				466.450.000
3	29	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Cabdin Wilayah Bangka Tengah dan Selatan	95%	25.000.000	APBD		1 dokumen	25.000.000
3	29	01	1.06	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Cabdin Wilayah Bangka Tengah dan Selatan	95%	125.750.000	APBD		1 dokumen	150.750.000
3	29	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintah Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Cabdin Wilayah Bangka Tengah dan Selatan	95%	185.700.000	APBD		1 dokumen	185.700.000
3	29	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Cabdin Wilayah Bangka Tengah dan Selatan	95%	105.000.000	APBD		1 dokumen	105.000.000
3	29	03		Program Pengelolaan Mineral dan Batubara				35.000.000				40.000.000

3	29	03	1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah dokumen Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Cabdin Wilayah Bangka Tengah dan Selatan	1 dokumen	35.000.000	APBD		1 dokumen	40.000.000
3	29	06		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan				25.000.000				25.000.000
3	29	06	1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah dokumen terkait Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Cabdin Wilayah Bangka Tengah dan Selatan	1 dokumen	25.000.000	APBD		1 dokumen	25.000.000
				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Cabdin Wilayah Belitung)				485.200.000				485.200.000
3				URUSAN PEMERINTAH PILIHAN				485.200.000				485.200.000
3	29			URUSAN PEMERINTAH BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				485.200.000				485.200.000
3	29	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				400.200.000				400.200.000

3	29	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Cabdin Wilayah Belitung	95%	35.000.000	APBD		1 dokumen	35.000.000
3	29	01	1.06	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Cabdin Wilayah Belitung	95%	160.000.000	APBD		1 dokumen	160.000.000
3	29	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Cabdin Wilayah Belitung	95%	145.200.000	APBD		1 dokumen	145.200.000
3	29	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Cabdin Wilayah Belitung	95%	60.000.000	APBD		1 dokumen	60.000.000
3	29	03		Program Pengelolaan Mineral dan Batubara				60.000.000				60.000.000
3	29	03	1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah dokumen Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Cabdin Wilayah Belitung	1 dokumen	60.000.000	APBD		1 dokumen	60.000.000

3	29	06		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan				25.000.000				25.000.000
3	29	06	1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah dokumen terkait Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Cabdin Wilayah Belitung	1 dokumen	25.000.000	APBD		1 dokumen	25.000.000
				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Cabdin Wilayah Belitung Timur)				579.700.000				579.700.000
3				URUSAN PEMERINTAH PILIHAN				579.700.000				579.700.000
3	29			URUSAN PEMERINTAH BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				579.700.000				579.700.000
3	29	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				439.700.000				439.700.000
3	29	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Cabdin Wilayah Belitung Timur	95%	25.000.000	APBD		1 dokumen	25.000.000
3	29	01	1.06	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Cabdin Wilayah Belitung Timur	95%	152.500.000	APBD		1 dokumen	152.500.000

3	29	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Cabdin Wilayah Belitung Timur	95%	157.200.000	APBD		1 dokumen	157.200.000
3	29	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Cabdin Wilayah Belitung Timur	95%	105.000.000	APBD		1 dokumen	105.000.000
3	29	03		Program Pengelolaan Mineral dan Batubara				105.000.000				105.000.000
3	29	03	1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah dokumen Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Cabdin Wilayah Belitung Timur	1 dokumen	105.000.000	APBD		1 dokumen	105.000.000
3	29	06		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan				35.000.000				35.000.000

3	29	06	1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah dokumen terkait Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Cabdin Wilayah Belitung Timur	1 dokumen	35.000.000	APBD		1 dokumen	35.000.000
---	----	----	------	--	---	-------------------------------	-----------	------------	------	--	-----------	------------

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 yang terdiri dari program, kegiatan, dan sub kegiatan berpedoman pada Kempmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021, beberapa kegiatan dan sub kegiatan mengalami pemutakhiran jika dibandingkan Rencana Kerja pada tahun 2022 yang mengacu pada Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Sesuai dengan hal tersebut maka Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2023 mengusulkan anggaran Belanja dari Alokasi APBD Provinsi sebesar Rp. 28.604.718.350,- dengan rincian sebagai berikut :

- Dinas ESDM Provinsi, terdiri dari 5 program, 29 kegiatan, dan 84 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.631.628.350,-
- Cabang Dinas ESDM Wilayah Bangka, terdiri dari 4 Program, 10 kegiatan, 22 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 502.140.000,-
- Cabang Dinas ESDM Wilayah Bangka Barat, terdiri dari 3 Program, 7 kegiatan, dan 20 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 904.600.000,-
- Cabang Dinas ESDM Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan, terdiri dari 3 Program, 6 kegiatan dan 16 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 501.450.000,-
- Cabang Dinas ESDM Wilayah Belitung, terdiri dari 3 Program dan 6 kegiatan, dan 18 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 485.200.000,-

- Cabang Dinas ESDM Wilayah Belitung Timur, terdiri dari 3 Program, 6 kegiatan, dan 19 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.579.700.000,-

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

I. DINAS ESDM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

Dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan rincian sub kegiatan :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan rincian sub kegiatan :
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - Sub Kegiatan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD;
 - Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- c) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan rincian sub kegiatan :
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d) Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan rincian sub kegiatan :
 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
- e) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan rincian sub kegiatan :
- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Sub Kegiatan Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material;
 - Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- f) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah, dengan rincian sub kegiatan :
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
- g) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan rincian sub kegiatan :
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah, dengan rincian sub kegiatan :

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel;
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

2. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian;

Dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- a) Kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi, dengan rincian sub kegiatan :
 - Sub Kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah;
 - Sub Kegiatan Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah;
 - Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah.
- b) Kegiatan penatausahaan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan pengusaha air tanah dalam daerah provinsi, dengan rincian sub kegiatan :
 - Sub Kegiatan Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah;
 - Sub Kegiatan Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah;

- Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah.

3. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara;

Dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- a) Kegiatan Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil, dengan rincian sub kegiatan :
 - Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah laut sampai dengan 12 Mil.

4. Program Pengelolaan Energi Terbarukan;

Dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- a) Kegiatan Pelaksanaan konservasi energi di wilayah provinsi, dengan rincian sub kegiatan :
 - Sub Kegiatan Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi;
 - Sub Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi;
 - Sub Kegiatan Sosialisasi secara menyeluruh dan Komprehensif untuk penggunaan Teknologi yang menerapkan Konservasi energi;
 - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi;
 - Pembinaan Dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi.

5. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan;

Dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- a) Kegiatan Penatausahaan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah dengan rincian sub kegiatan :
- Sub Kegiatan Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah Provinsi;
 - Sub Kegiatan Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah Provinsi;
 - Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi Yang Fasilitas Instansinya Dalam Daerah Provinsi.
- b) Kegiatan Penatausahaan Jasa Izin Usaha Penunjang Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri atau Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan rincian sub kegiatan :
- Sub Kegiatan Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri;
 - Sub Kegiatan Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri;
 - Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri;
- c) Kegiatan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil, dan Pedesaan.
- Sub Kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu

- Sub Kegiatan Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu
- Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu
- Sub Kegiatan Pengumpulan Dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil, dan Pedesaan.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil, dan Pedesaan.

II. CABANG DINAS ESDM WILAYAH BANGKA

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

Dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- a) Kegiatan admintrasi keuangan perangkat daerah, dengan rincian sub kegiatan :
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
- b) Kegiatan admintrasi Umum perangkat daerah, dengan rincian sub kegiatan :
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - Penyediaan Bahan/Material;
 - Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- c) Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan rincian sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- d) Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, dengan rincian sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
2. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara
- Dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
- a) Kegiatan Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil, dengan rincian sub kegiatan :
- Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah laut sampai dengan 12 Mil.
3. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
- Dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
- a) Kegiatan Penatausahaan izin operasi yang fasilitas instalasi dalam provinsi, dengan rincian sub kegiatan :
- Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi Yang Fasilitas Instansinya Dalam Daerah Provinsi.

III. CABANG DINAS ESDM WILAYAH BANGKA BARAT

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- Dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
- a) Kegiatan admintrasi keuangan perangkat daerah, dengan rincian sub kegiatan :

- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
- b) Kegiatan admintrasi Umum perangkat daerah, dengan rincian sub kegiatan :
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - Penyediaan Bahan/Material;
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- c) Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan rincian sub kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- d) Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, dengan rincian sub kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

2. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara

Dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- a) Kegiatan Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mneral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil, dengan rincian sub kegiatan :
 - Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan

dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah laut sampai dengan 12 Mil.

3. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

Dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- a) Kegiatan Penatausahaan izin operasi yang fasilitas instalasi dalam provinsi, dengan rincian sub kegiatan :
 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi Yang Fasilitas Instansinya Dalam Daerah Provinsi.

IV. CABANG DINAS ESDM WILAYAH BANGKA TENGAH DAN BANGKA SELATAN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

Dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- a) Kegiatan admintrasi keuangan perangkat daerah, dengan rincian sub kegiatan :
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
- b) Kegiatan admintrasi Umum perangkat daerah, dengan rincian sub kegiatan :
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - Penyediaan Bahan/Material;
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- c) Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan rincian sub kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- d) Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, dengan rincian sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
2. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara
- Dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
- a) Kegiatan Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil, dengan rincian sub kegiatan :
- Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah laut sampai dengan 12 Mil.
3. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
- Dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
- a) Kegiatan Penatausahaan izin operasi yang fasilitas instalasi dalam provinsi, dengan rincian sub kegiatan :
- Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi Yang Fasilitas Instansinya Dalam Daerah Provinsi.

V. CABANG DINAS ESDM WILAYAH BELITUNG

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- Dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
- a) Kegiatan admintrasi keuangan perangkat daerah, dengan rincian sub kegiatan :

- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
- b) Kegiatan admintrasi Umum perangkat daerah, dengan rincian sub kegiatan :
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - Penyediaan Bahan/Material;
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- c) Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan rincian sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- d) Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, dengan rincian sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

2. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara

Dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- a) Kegiatan Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mneral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil, dengan rincian sub kegiatan :
- Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan

dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah laut sampai dengan 12 Mil.

3. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

Dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- a) Kegiatan Penatausahaan izin operasi yang fasilitas instalasi dalam provinsi, dengan rincian sub kegiatan :
 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi Yang Fasilitas Instansinya Dalam Daerah Provinsi.

VI. CABANG DINAS ESDM WILAYAH BELITUNG TIMUR

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

Dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- a) Kegiatan admintrasi keuangan perangkat daerah, dengan rincian sub kegiatan :
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
- b) Kegiatan admintrasi Umum perangkat daerah, dengan rincian sub kegiatan :
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - Penyediaan Bahan/Material;
 - Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- c) Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan rincian sub kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 - d) Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, dengan rincian sub kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
2. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara
- Dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
- a) Kegiatan Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil, dengan rincian sub kegiatan :
 - Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah laut sampai dengan 12 Mil.
3. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
- Dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
- a) Kegiatan Penatausahaan izin operasi yang fasilitas instalasi dalam provinsi, dengan rincian sub kegiatan :
 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi Yang Fasilitas Instansinya Dalam Daerah Provinsi.

Usulan program dan kegiatan tersebut diharapkan dapat mendukung prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta diharapkan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 dapat mewujudkan visi dan misi Gubernur terpilih 2017-2022. Selanjutnya rumusan rencana program dan

kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 dan prakiraan maju tahun 2023 disajikan pada tabel berikut: